

# SKRIPSI

**WAHYU JADMIKO**

## **TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI TERHADAP KREDIT USAHA TANI (Studi Kasus KUD Sumber Rejeki Mojoagung Jombang)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI  
TERHADAP KREDIT USAHA TANI**  
(Studi Kasus KUD Sumber Rejeki Mojoagung Jombang)

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**



**Dosen Pembimbing,**

**Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum**  
**NIP. 130 675 515**

**Penyusun,**

**Wahyu Jadmiko**  
**Nim : 039614436**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Bertitik tolak pada bab bab terdahulu, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengurus Koperasi/KUD mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Penyaluran KUT. Sehingga Pengurus koperasi mempunyai kewenangan untuk menandatangani perjanjian pinjaman KUT dengan Bank Pelaksana, mencairkan dana KUT pada Bank Pelaksana dan meneruskannya langsung kepada petani atau melalui kelompok tani. Karena mempunyai kewenangan yang begitu besar maka tanggung jawab dari koperasi dalam hal ini diwakili oleh pengurus koperasi adalah bertanggung atas pelunasan KUT dari kelompok tani/petani kepada Bank Pelaksana secara penuh.
- b. Usaha untuk mengatasi tunggakan adalah dengan cara melakukan pendekatan secara persuasif dengan membentuk tim penagih yang diketuai oleh Kakandepkop pk&M dengan melibatkan satpel Bimas, PPL, LSM dan menggencarkan gerakan pengembalian KUT. Penyelesaian KUT belum sampai lewat jalur hukum dengan melaporkan pihak-pihak yang terkait tunggakan KUT di Kejaksaan karena kebanyakan tunggakan KUT itu mengendap di tangan penerima KUT. Dan jika lewat jalur hukum belum tentu dana KUT kembali. Dan Pemerintah masih melihat bahwa para pelaksana KUT dalam hal ini Koperasi (executing) masih punya itikad baik dalam soal KUT.

## 2. Saran

- a. Guna mengurangi berbagai persoalan dalam penyelesaian KUT seyogyanya pemerintah melalui Departemen terkait yaitu DEPKOP, DEPTAN, DEPDAGRI dalam hal ini PEMDA dan DEPKEU harus lebih bisa bekerjasama dalam pembuatan aturan-aturan tentang KUT. Karena dalam praktek antara Bank Rakyat Indonesia dan UIC itu diharapkan Pemerintah membuat ketentuan yang berlaku untuk semua instansi, dengan dibuatnya ketentuan yang berlaku untuk semua instansi, maka diharapkan dapat melindungi instansi untuk menyalurkan KUT sekaligus dalam pengembaliannya sehingga kebocoran KUT yang besar dapat ditekan sekecil mungkin. Untuk mengurangi kebocoran KUT di Lapangan, adanya keterbukaan para pihak yang terkait dengan KUT. Petani/kelompoktani harus memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dalam penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani sehingga petani yang menerima KUT benar-benar mempunyai sawah hamparan dan bukannya petani berdasi. Untuk pengurus koperasi yang meneruskan dana KUT ke petani jangan membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani fiktif dengan membuat kelompoktani-kelompoktani fiktif yang membuat kebocoran KUT yang besar sehingga membuat negara dirugikan. Bagi PPL jangan asal menandatangani Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani dengan tidak mengecek kebenarannya di lapangan, karena sukses tidaknya tergantung dari PPL. Karena PPL sebagai ujung tombak keberhasilan KUT.